

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam sektor pemerintahan, dalam melaksanakan tugas yang diemban mutlak memiliki rencana-rencana yang disusun dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas demi mencapai tujuan dari organisasi, terutama anggaran. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Menurut Kennis (1979) dalam Fazli dan Muslim mendefinisikan: “Partisipasi sebagai tingkat keterlibatan manajer dalam penyiapan anggaran dan besarnya pengaruh manajer terhadap budget goals unit organisasi yang menjadi tanggungjawabnya.” Sedangkan Menurut freeman dan shoulders (2003) dalam Deddi Nordiawan mendefinisikan bahwa anggaran sebagai berikut : “Anggaran merupakan suatu proses pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas (unlimited demands).”

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran ini dimaksudkan agar pemerintah mengetahui sebatas mana kemampuan yang dimiliki pemerintah dalam melaksanakan tugasnya agar selaras dengan tujuan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan anggaran dalam pemerintahan harus benar-benar memfokuskan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat bukan hanya untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau golongan semata. Untuk itulah diperlukan informasi yang benar-benar akurat

dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah, jangan sampai usulan-usulan yang telah disampaikan oleh masyarakat tidak terakomodasi dalam anggaran

Dengan demikian proses penyusunan dan penetapan anggaran dalam pemerintahan menerapkan anggaran partisipatif. Menurut Anthony dan Govindarajan menyatakan bahwa : “Partisipasi anggaran yaitu proses dimana pembuat anggaran terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan besar anggaran”. Sedangkan menurut Mulyadi menyatakan bahwa : “Partisipasi anggaran merupakan proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pihak yang membuat keputusan”.

Komitmen organisasional menunjukkan sejauh mana seseorang memihak sebuah organisasi serta tujuan-tujuannya dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan sebagai anggota organisasi. menurut Sunyoto dan Burhanudin mengatakan bahwa “komitmen organisasional adalah alasan individu untuk mempertahankan keanggotaannya didalam suatu organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi”. Sedangkan menurut Mowday (1982) yang dikutip juga oleh sopiah mendefinisikan “komitmen organisasional sebagai dimensi perilaku penting yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai anggota organisasi, komitmen organisasional merupakan identifikasi dan keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi untuk tetap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi.

Kinerja atau prestasi kerja merupakan hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku, dalam kurun waktu tertentu, berkenaan dengan pekerjaan serta perilaku dan tindakannya dalam Suwatno. “Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi Mahsun.

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) merupakan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh seorang kepala satuan kerja dan bertanggung jawab atas entitasnya, misalnya : dinas kesehatan, dinas kependudukan dan catatan sipil, dinas pendidikan, dinas pemuda dan olah raga dan lainnya. Kinerja suatu unit kerja pemerintah daerah dapat diukur melalui pencapaian aktivitas-aktivitas yang dibiayai oleh APBD untuk dapat memenuhi tuntutan akan akuntabilitas publik diperlukan adanya paradigma baru dalam manajemen keuangan daerah : APBD harus berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan publik; APBD merupakan dana publik yang penggunaannya harus berorientasi pada kinerja yang baik (ekonomis, efisien dan efektif); Penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan APBD.

Kinerja (prestasi) manajer publik dinilai berdasarkan berapa target yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan yang dapat diukur melalui pencapaian aktivitas-aktivitas yang dibiayai oleh APBD dalam Mardiasmo. Pengungkapan kinerja pemerintah daerah secara tepat dan objektif akan memungkinkan terlaksananya evaluasi kinerja, baik secara internal maupun eksternal. Evaluasi semacam ini pada tahap selanjutnya akan menumbulkan perbaikan atau peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengungkapan kinerja akan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menuntun perbaikan dalam memberikan pelayanan masyarakat.

Fenomena yang terjadi tentang kinerja instansi di Pemerintah Kota Bandung tahun 2013 telah mendapatkan fakta dimana kinerja dinilai kurang baik. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Haneda Tri Lastoto memaparkan 18 SKPD di Pemerintah Kota Bandung termasuk dalam kategori zona merah, 11 SKPD masuk dalam zona kuning dan hanya satu SKPD saja yang masuk dalam predikat zona hijau (tingkat kepatuhan tinggi) terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. (<http://daerah.sindonews.com/>).

Adanya permasalahan terhadap 18 SKPD ini menunjukkan bahwa kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung dianggap tidak terlaksana dengan baik. Sehingga hal ini menyebabkan harus adanya pemetaan terhadap faktor yang menyebabkan tidak baiknya kinerja SKPD. Penulis dalam hal ini memandang bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi menjadi dua hal yang cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait hubungannya terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Fenomena yang terjadi tentang Kinerja tahun 2014 Penggunaan anggaran di Pemerintah kota Padang ternyata masih lemah, terlihat dari pola penyerapan anggaran yang masih cenderung menumpuk diakhir tahun anggaran. Sejumlah SKPD tidak mampu merealisasikan pekerjaannya sesuai target yang ditetapkan. “Ini membuktikan beberapa kinerja SKPD kota padang dinilai buruk”. Faktor-faktor ini disebabkan karena pengelolaan yang tidak hati-hati-hati, adanya pemborosan atas biaya yang tidak perlu, penggunaan sumber daya yang tidak memadai serta pencapaian target dan kebijakan yang tidak tepat. Seperti Dinas Pertanian Peternakan Kehutanan dan Perkebunan (Dispernahutbun) pemerintah kota Padang, dana alokasi khusus untuk pertanian dan kehutanan tersisa sebanyak Rp155,9 juta selama tahun 2011 sampai tahun 2013. Akibatnya banyak program

Dispernakhutbun tidak diselesaikan dengan baik. Lemahnya perencanaan kegiatan akibat para satker (satuan kerja) yang kurang siap dalam menyusun rencana anggaran, pelaksanaan kegiatan banyak yang tertunda dari jadwal, dan penyerapan anggaran pun menjadi tidak optimal. Seyogianya kinerja SKPD dapat dilihat dari seberapa mampu mencapai target dan prosentase fisik dan keuangan program/kegiatan. Banyaknya anggaran yang hanya sebagian terserap akibat berbagai kendala yang dihadapi SKPD, seperti penerapan sistem pengendalian intern yang kurang baik dalam pelaksanaan program. Kendala lainya yaitu kualitas sumber daya manusia, seperti masih banyaknya pegawai SKPD yang tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik sehingga program atau kegiatan yang dikerjakan tidak selesai dan terlambat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. (<http://www.antaraneews.com/berita>).

Fenomena yang terjadi pada tahun 2016 pada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul terancam dicopot dari jabatan, apabila SKPD yang bersangkutan memiliki kinerja keuangan buruk, ditunjukkan dari laporan anggaran yang rendah ([Uli Febriarni/JIBI/Harian Jogja](#))

Selain teori tersebut, Penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya oleh Rafika Anggaraeni (2009) menguji Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja SKPD Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. Metode penelitian pada penelitian ini adalah dengan menggunakan desain penelitian kausal, dengan jumlah sampel 36 responden dari 12 dinas sebagai SKPD yang diteliti. Jenis data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan, 1) partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD Pemerintahan Labuhan Batu, 2) komitmen organisasi juga tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD pemerintahan Labuhan Batu, 3) partisipasi anggaran dan

komitmen organisasi secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD Pemerintahan Kabupaten Batu. masing-masing tanggung jawab atas tugas yang diemban.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bambang (2007) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, karena partisipasi yang tinggi yang terdapat dalam diri setiap individu dalam proses penyusunan anggaran akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah. Dengan adanya partisipasi oleh aparat pemerintah daerah, maka aparat tersebut berusaha untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Dengan adanya tanggung jawab ini maka, akan menjadikan kinerja yang baik bagi organisasi pemerintah, sehingga semakin tingginya partisipasi aparat pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja di satuan Pemerintah Daerah. Dugaan ini oleh peneliti akan di uji pada hipotesis H1, Partisipasi Anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Restu Agisti (2012) ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat Pemda dan untuk melihat seberapa besar pengaruh moderating desentralisasi dan budaya organisasi terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Hipotesis pertama diajukan adalah untuk menguji apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemda di Kabupaten Bengkalis. Dengan kata lain, apakah semakin meningkatnya partisipasi dalam penyusunan anggaran maka kinerja aparat pemda akan semakin meningkat pula. Jika p value (sign) < dari 0,05 maka H1 diterima, sebaliknya apabila p value (sign) > 0,05 maka H1 ditolak. Dalam penelitian ini, nilai

p value (sign) 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemda.

Penelitian yang dilakukan Dian Meta Sari ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan kepuasan kerja dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating di pemerintah daerah kabupaten bandung. Responden dari penelitian ini adalah kepala dinas, kepala sub bagian, kepala bidang. Kepala sub bidang atau kepala masing masing seksi dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis daerah) dimasing masing dinas dilingkungan SKPD kabupaten bandung. Kuisisioner yang disebarakan sebanyak 75 buah. Kuisisioner yang kembali berjumlah 75 dan kemudian dimasukan dalam pengolahan data. Dari analisis data yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggran terhadap kinerja aparat diperoleh persamaan $Y = 18,608 + 0,588 \text{ PPA}$. kemudian untuk hipotesis kedua dari ketiga diperoleh persamaan regresi moderasi sebagai berikut : $Y = 19,841 - 1,080 \text{ PPA} + 0,269 \text{ KK} + 0,032 \text{ PPA} * \text{KK}$ dan $Y = 11,512 - 0,853 \text{ PPA} + 0,446 \text{ KO} + 0,022 \text{ PPA} * \text{KO}$ yang menunjukkan bahwa interaksi partisipasi penyusunan anggaran kepuasan kinerja dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Dalam penelitian ini hipotesis dapat diterima, yaitu kinerja aparat ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar $2,122 > t$ tabel $2,000$ dengan angka signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhalimah darwis dan Syukriy Abdullah bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur perangkat daerah di Pemerintah Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur yang ada dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yang meliputi dinas, kantor dan badan. Pada SKPD Pemerintah Aceh terdapat 33 SKPD yang keseluruhan pegawainya berjumlah ± 7675 orang. Sedangkan sampel penelitian ini adalah kepala SKPD, sekretaris SKPD, dan kepala bagian yang berjumlah 3 orang pada setiap badan, dinas dan kantordi Pemerintah Aceh. Sehingga jumlah responden dalam sampel ini sebanyak 99 orang. Penelitian ini merupakan penelitian sensus, dan pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuesioner yang berisikan 18 pernyataan. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian secara terpisah menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah di Pemerintah Aceh.

Penulis menggunakan penelitian terdahulu yang dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dengan adanya beberapa perbedaan dan persamaan di dalam penelitian ini dengan peneliti terdahulu.

Berdasarkan teori dan uraian di atas dan didukung dengan beberapa fakta yang ada, penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai “ **Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Survey pada Dinas Pemerintah Kota Bandung)**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Partisipasi Anggaran pada Pemerintah Kota Bandung
2. Bagaimana Komitmen Organisasi pada Pemerintah Kota Bandung
3. Bagaimana Kinerja Instansi pada Pemerintah Kota Bandung

4. Seberapa besar Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Instansi pada Pemerintah Kota Bandung
5. Seberapa besar pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Instansi pada Pemerintah Kota Bandung
6. Seberapa besar pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Instansi pada Pemerintah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan penelitian

1.3.1 Maksud penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian mengenai pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Pemerintahan Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Anggaran pada Pemerintah Kota Bandung
2. Untuk mengetahui bagaimana Komitmen Organisasi pada Pemerintah Kota Bandung
3. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Instansi pada Pemerintah Kota Bandung
4. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Bandung

5. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Instansi pada Pemerintah Kota Bandung
6. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Pemerintahan Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu kegunaan secara praktis dan kegunaan secara teoritis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain;

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah untuk menyikapi isu-isu kekinian dalam pengembangan akuntansi itu sendiri.
 - c. Hasil penelitian ini juga akan melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan

terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak – pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu Partisipasi Penyusunan Anggaran , Komitmen Organisasi, dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keadaan dalam Proses Anggaran , Komitmen Organisasi dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah khususnya pada Pemerintah Kota Bandung.

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja dalam pengorganisasian Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awam mengenai pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintahan Kota Bandung.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam memperbanyak pengetahuan yang berhubungan dengan Partisipasi Anggaran , Komitmen Organisasi, dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Dinas Pemerintah Kota Bandung. Serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi, terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.